

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP NADZIR YANG  
TIDAK MELAPORKAN PENGELOLAAN HARTA WAKAF  
DI DESA KEJAPANAN KECAMATAN GEMPOL  
KABUPATEN PASURUAN**

**SKRIPSI**



**Diajukan kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S.2011 067 AS	No REG : S.2011/AS/067
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

**Oleh :**

**MAULIDATUSSA'DIYAH**  
**NIM. C01207011**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah  
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah  
SURABAYA**

**2011**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Maulidatus Sa'diyah  
NIM : C01207011  
Fakultas/Jurusan : Syariah / Ahwalus Syakhshiyah  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Nadzir Yang Tidak  
Melaporkan Pengelolaan Harta Wakaf Di Desa Japanan  
Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Juni 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI  
TEMPEL

PAJAK MENANJANG BARISKA  
7-01  
20

CFCB8AAF421279496

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP



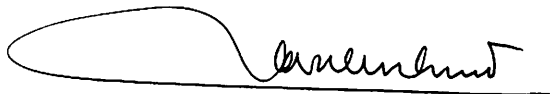
Maulidatus Sa'diyah  
C01207011

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh MAULIDATUS SA'DIYAH (C01207011) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Juni 2011

Pembimbing



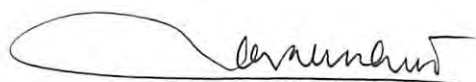
Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.  
NIP. 195704231986032001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Maulidatus Sa'diyah** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



**Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.**  
NIP. 195704231986032001

Sekretaris,



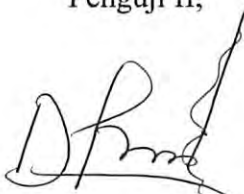
**Siti Rumilah M.Pd**  
NIP. 197607122007102005

Penguji I,



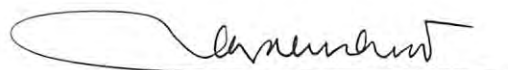
**Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag**  
NIP. 195005201982031002

Penguji II,



**H. Darmawan, SHI. MHI**  
NIP. 198004102005011004

Pembimbing,



**Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.**  
NIP. 195704231986032001

Surabaya, 20 Juli 2011

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



**Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag**  
NIP. 195005201982031002





























Sebelumnya masalah wakaf telah banyak ditulis secara teoritis di dalam literatur, akan tetapi masalah Nadzir yang tidak melaporkan pengelolaan harta wakaf di Desa Kejaman Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan adalah penelitian yang pertama kali dikupas dan dibahas.

Adapun pembahasan tentang wakaf sebagaimana yang sudah pernah dibahas antara lain:

- a. Buku yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI yang berjudul Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia Tahun terbit 2006. Buku ini membahas tentang hambatan pengembangan wakaf di Indonesia dan keberadaan Nadzir wakaf yang masih tradisional.
- b. Skripsi dengan judul, Analisis Faktor-faktor Penyebab Wakaf di bawah Tangan tahun 2001-2005 (Studi Kasus di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora) oleh Nurul Khalifah (2101228). Pada skripsi ini lebih ditekankan pada beberapa permasalahan yaitu : *Pertama*, Bagaimana praktik wakaf dibawah tangan yang terjadi di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, *Kedua*, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya wakaf di bawah tangan di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, dan *Ketiga*, bagaimana implikasi wakaf di bawah tangan di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora.
- c. Skripsi dengan judul, Studi Analisis Terhadap Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Imbalan Nadzir Wakaf, oleh Teja Sukmana













**b. Wawancara dan Interview**

Wawancara yang digunakan sebagai alat pengumpulan data dengan cara menginterview dan bertanya pada tokoh masyarakat, perangkat desa, dan lain sebagainya supaya mendapatkan data yang sempurna tentang Nadzir yang tidak melaporkan pengelolaan harta wakaf di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

Teknik wawancara ini dilakukan dengan tujuan:

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan Nadzir tidak melaporkan pengelolaan harta wakaf di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan
- 2) Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dari harta wakaf yang tidak dilaporkan oleh Nadzir ke PPAIW Kecamatan Gempol.

**c. Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Nadzir yang tidak melaporkan pengelolaan harta wakaf kepada KUA di Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Data tersebut dapat dipertanggungjawabkan yang berupa data tertulis dari harta wakaf baik yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan oleh Nadzir di KUA / PPAIW Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.





























































Dalam melaksanakan tugas, Nadzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 %. Dalam melaksanakan tugas, Nadzir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

Dalam hukum Islam, Nadzir berhak mendapatkan upah yang standar, baik dia membutuhkannya ataupun tidak membutuhkannya. Sebab upah itu sudah menjadi hak Nadzir atas jerih payahnya mengelola harta wakaf dan diberikan kepadanya tanpa memandang tingkat kebutuhannya.

Jika Nadzir memiliki upah yang telah ditentukan, baik oleh Wakif maupun Hakim, maka Nadzir berhak mendapatkan upah semenjak Nadzir mulai mengelola dan mengurus harta wakaf baik dengan cara membangun, mengeksploitasi, menjual hasil produksi dan lain sebagainya, sebab upah tersebut sebagai balasan dari pekerjaan Nadzir.

Jika upah Nadzir tidak ditentukan oleh Hakim dan Wakif, maka bukan berarti Nadzir tidak mendapatkan upah. Nadzir tetap mendapatkan upah (standar) sebagai haknya dihitung sejak Nadzir menjalankan aktivitas dan tugasnya sebagai Nadzir.



















10.	An-Nur	Bandulan	
11.	Nurussalam	Bandulan	
12.	Nur Hidayah	Bandulan	*
13.	Muhajirin	Bandulan	
14.	Asnan	Melian	
15.	Al-Ikhlash	Melian	
16.	Sudirman	Melian	
17.	Al-Ihsan	Melian	
18.	Nurul Falah	Melian	
19.	Riyadul Jannah	Melian	
20.	At-Thahiriyah	Melian	
21.	Nurul Falah	Melian	
22.	Taqwa	Melian	
23.	Al-Anbiya'	Melian	
24.	Hidayatullah	Melian	
25.	Nurul Amin	Japanan	
26.	Al-Hidayah	Japanan	
27.	Al-Ikhlash	Japanan	
28.	Al-Amin	Japanan	*
29.	Nurul Huda	Japanan	
30.	Sabilul Mustaqim	Japanan	*
31.	Ummul Kirom	Japanan	*
32.	Al-Fatah	Japanan	*
33.	Al-Intisorul	Japanan	
34.	Al-Karamah	Japanan	
35.	Al-Khatib	Japanan	*
36.	Al-Mabrur	Japanan	*
37.	At-Thoyyibah	Pandean	
38.	Al-Amin	Tawangsari	
39.	Al-Ikhlash	Tawangsari	
40.	Sadiqul Marhamah	Tawangsari	
41.	At-Taqwa	Balun	
42.	Al-Ittifaq	Arjosari	
43.	Ar-Ridwan	Arjosari	
44.	Al-Azhar	Arjosari	
45.	At-Taubah	Besuki	
46.	Assabariah	Besuki	
47.	Baiturrakhim	Besuki	
48.	Miftahul Ulum	Besuki	
49.	Al-Kautsar	Besuki	
50.	Baiturrahman	Besuki	
51.	Inthorul Hidayah	Besuki	
52.	Abdul Manaf	Besuki	
53.	Al-Bassam	Besuki	

54.	Ki Ageng	Penanggungan	
55.	Al-Ihsan	Penanggungan	
56.	Nurul Iman	Penanggungan	
57.	Al-Abrar	Penanggungan	
58.	Al-Jamarat	Penanggungan	
59.	Nurul Azizah	Penanggungan	
60.	Al-Islakh	Penanggungan	
61.	Al-Ikhlash	Penanggungan	
62.	Al-Hidayah	Penanggungan	
63.	Nurul Ajdad	Penanggungan	
64.	Al-Ittihat	Penanggungan	
65.	Darul Arqom	Penanggungan	
66.	Nurul Jadid	Penanggungan	
67.	Al-Amin	Penanggungan	
68.	Ar-Rahmat	Penanggungan	
69.	Al-Husaini	Penanggungan	
70.	Al-Karamah	Penanggungan	
71.	Al-Husaini	Penanggungan	
72.	Nyai Jaimi	Penanggungan	
73.	Bitisorul Hidayah	Penanggungan	
74.	Al-Fatah	Penanggungan	
75.	Al-Infiqat	Balai Desa	
76.	Darussalam	Melian Darussalam	

Tabel 7

### Data Tempat Pendidikan Desa Kejapanan

No.	Nama	Alamat	Status	Pengelola	Ket
1.	TK Masyithoh I	Bandulan	Pemerintah	Yayasan	
2.	TK Masyithoh II	Penanggungan	Pemerintah	Yayasan	
3.	TK Hasyim Asy'ari	Tawang Sari	Pemerintah	Yayasan	
4.	TK Aisyah, ABA	Penanggungan	Wakaf	Nadzir	*
5.	TK Miftahul Ulum	Japanan	Pemerintah	Yayasan	
6.	TK Plus Tunas Mandiri	Japanan	Pemerintah	Yayasan	
7.	SDN I	Penanggungan	Wakaf	Nadzir	*
8.	SDN II	Penanggungan	Wakaf	Nadzir	*
9.	SDN III	Bandulan	Pemerintah	Lembaga	
10.	SDN IV	Japanan	Pemerintah	Lembaga	
11.	MI Hasyim Asy'ari	Tawang Sari	Pemerintah	Yayasan	
12.	SDI Masyithoh	Bandulan	Pemerintah	Yayasan	
13.	MI Mifatahul Ulum	Japanan	Wakaf	Nadzir	*
14.	SD Muhammadiyah II	Penanggungan	Pemerintah	Yayasan	
15.	SMP YAPENAS	Japanan	Pemerintah	Yayasan	
16.	MTs Hasyim Asy'ari	Tawang Sari	Pemerintah	Yayasan	





























apalagi akad perwakafan yang nilainya banyak dan memiliki resiko berat, maka sangat penting untuk dicatatkan demi kemaslahatan umat yang didasarkan pada qaidah fiqh **تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ** yang artinya tindakan Imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Oleh karena itu wakaf sangat penting untuk dicatatkan. Karena jika tidak dicatatkan, dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan harta wakaf tersebut dan tidak memiliki kemaslahatan untuk umat.

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11 juga dijelaskan masalah tugas Nadzir yakni Nadzir wajib melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Dalam hal ini, pengadministrasian dilakukan pada PPAIW KUA setempat.

Dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 7 ayat (2), Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf. Hal ini sama dengan yang disebutkan dalam KHI.

Disebutkan dalam KHI Pasal 220 ayat 2 yang mewajibkan Nadzir untuk membuat laporan perwakafan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan Camat setempat.

Dari yang telah disebutkan di atas, sudah banyak dasar yang mewajibkan pelaporan dan pencatatan (pengadministrasian) harta benda wakaf. Oleh karena itu, jika di Desa Kejapanan terdapat banyak Nadzir yang tidak melaporkan

pengelolaan harta wakaf ke PPAIW KUA Kecamatan Gempol baik itu sengaja atau tidak sengaja melaporkan, solusi yang timbul adalah agar kepada pihak PPAIW untuk mensosialisasikan aturan-aturan tentang pentingnya melaporkan pengelolaan harta wakaf ke PPAIW setempat serta sosialisasi tentang sanksi pidana terhadap pengelolaan harta wakaf yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ada. Hal tersebut diharapkan agar suatu saat tidak terjadi permasalahan yang sama. Jika sebelumnya pihak KUA sudah merasa mengingatkan, maka seharusnya Nadzir memperoleh sanksi pidana yang telah disebutkan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 pasal 67 serta memperoleh sanksi administratif yang dalam KHI dijelaskan bahwa Nadzir akan diberhentikan dari jabatannya jika Nadzir tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan yang sudah ditentukan.

Untuk menghindari kasus-kasus yang sama, maka tanah yang diwakafkan penting untuk dilaporkan, dicatatkan dan di AIW kan pada PPAIW setempat agar tanah wakaf tersebut mendapatkan kepastian hukum yang jelas dari Negara maupun BPN kalau tanah tersebut memang merupakan bagian dari tanah wakaf.

Dari analisis yang telah dijelaskan dalam skripsi ini, maka dapat diketahui bahwa permasalahan yang ada di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, yakni masalah tidak adanya pelaporan dan pencatatan

harta benda yang diwakafkan pada PPAIW setempat, sudah sangat bertentangan dengan ketentuan yang ada dan tidak sejalan dengan hukum Islam.

Dalam hukum Islam, memang tidak disebutkan secara rinci tentang kewajiban melaporkan pengelolaan harta benda wakaf, hanya saja diqiyaskan dengan pendapat Ulama dan ayat al-Qur'an. Namun dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 serta KHI yang telah disebutkan secara jelas mengenai pencatatan dan pelaporan harta benda wakaf. Dalam hal ini, maka penulis lebih condong untuk wajibnya melaporkan pengelolaan harta benda wakaf yang sudah dijelaskan dalam KHI dan Undang-Undang yang ada. Maka penulis tidak sepakat jika pengelolaan harta wakaf tidak dilaporkan dan dicatatkan ke PPAIW setempat sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta aturan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 serta PP Nomor 28 Tahun 1977 serta KHI tentang wajibnya melakukan pelaporan secara berkala oleh pihak yang mengurus perwakafan terhadap semua bentuk tanah atau harta benda yang diwakafkan.











